

Pemikiran Politik Negara Dan Agama

“Ahmad Syafii Maarif”

Ahmad Sholikin*

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang pemikiran politik Negara dan Agama Ahmad Syafii Maarif, serta latar belakang pemikiran tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan data pustaka sebagai sumber utama penelitian ini. Penulis menggunakan teori politik Islam Al-Maududi untuk menganalisa pemikiran politik Buya Syafii, dan sosiologi pengetahuan Karl Manheim untuk menganalisa latar belakang pemikiran tersebut. Hasil penelitian ini adalah, pertama, Ahmad Syafii Maarif adalah seorang Intelektual Muslim yang menggunakan semangat moral Islam sebagai dasar berpijak dari seluruh pemikiran politiknya. Pola hubungan antara negara dan agama tergambar dalam pola yang saling memerlukan, Negara memerlukan agama sebagai sumber prinsip moral-transendental bagi tegaknya keadilan dan prinsip persamaan dalam sebuah negara, sedangkan Agama butuh negara sebagai institusi pelindung bagi terlaksananya ajaran moral agama dapat terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Ahmad Syafii Maarif dalam hal pemikiran negara dan agama mengalami transformasi pemikiran yang sangat kontras, dari syariat oriented pemikiran Moh. Natsir sebelum menjadi seorang sosial-demokrat yang menjadi orientasi dari Muhammad Hatta. Titik kontras pemikirannya adalah sebelum Chicago dan pasca Chicago.

Kata Kunci : Pemikiran Politik Islam, Relasi Negara dan Agama, Ahmad Syafii Maarif.

Abstraction

The journal discusses the political thought of the State and Religion Syafii Maarif and Conceptual background. The author used qualitative research methods, with data library as the main source of this study. The author uses the theory of political Islam Al-Mawdudi to analyze political thought Buya Syafii, Karl Manheim and the sociology of knowledge to analyze the conceptual background. The results of this study are, firstly, Ahmad Syafii Maarif is a Muslim intellectual who use Islam as a basic moral spirit rests from all his political thinking. The pattern of the relationship between state and religion is reflected in the pattern of mutual need, the State need religion as a source of transcendent moral principles for the establishment of justice and the principle of equality in a country, while the state takes religion as a protective institution for the implementation of the moral teachings of religion can be implemented in everyday life days. Second, Ahmad Syafii Maarif in terms of state and religious thinking thoughts transformation of stark contrasts, from Shari'a Moh oriented thinking. Natsir before becoming a social-democrat, the orientation of Mohammad Hatta. The point of contrast is thinking before Chicago and post- Chicago.

Keywords : Islamic Political Thought, Ahmad Syafii Maarif, Relation of State and Religion.

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

A. Pendahuluan

Agama dan politik merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan manusia, dan persoalan hubungan antara keduanya juga telah menjadi bahan pemikiran para ilmuwan, filsuf maupun teolog sepanjang sejarah. Salah satu karakteristik Islam sebagai agama pada awal-awal perkembangannya adalah kejayaan di bidang politik. Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai kebenaran yang satu dan yang sama, melainkan juga sebagai masyarakat yang total.¹ Atas dasar adanya pertimbangan nilai-nilai keagamaan akan memberi harapan tumbuhnya kegiatan politik bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama, tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan teknisnya, politik adalah wewenang manusia, melalui pemikiran rasionalnya (yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijtihad). Dalam hal inilah politik dapat dibedakan dari agama. Maka dalam segi struktural dan prosedural politik itu, dunia Islam sepanjang sejarahnya, mengenal berbagai variasi dari masa ke masa dan dari kawasan ke kawasan, tanpa satu pun dari variasi itu dipandang secara doktrinal paling absah (kecuali masa kekhalifahan Rasyidah).²

Agama telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia, selain itu agama juga diyakini tidak hanya berbicara soal ritual semata melainkan juga berbicara tentang nilai-nilai yang harus dikonkretkan dalam kehidupan sosial dan dalam ranah ketatanegaraan, sehingga muncul tuntutan agar nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan bernegara.³

Gagasan tentang relasi Islam dan Negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia

meskipun telah diperdebatkan beberapa tahun yang lalu, dan mengalami *fluctuative discourse* dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu *survive* pada momen-momen tertentu. Ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.

Sejak Pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno, Pancasila menjadi bagian perdebatan politik yang tidak terelakan oleh politikus dan agamawan, khususnya Islam.⁴ Keinginan sebagian kalangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara bukanlah fenomena yang baru, ini telah mencuat sejak Indonesia masih berumur belasan bulan, tepatnya ketika

penentuan dasar negara. Wacana negara Islam dan formalisasi Syariat Islam di

Indonesia kian merebak pasca tumbang rezim otoriter Orde Baru. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari tumbuh suburnya kelompok-kelompok Islam radikal yang demikian getol mengusung formalisasi Syariat Islam. Politik praktis menjadi jalan formal untuk mengusung Syariat Islam sebagai ideologinya, tercatat ada beberapa partai Islam semisal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sejalan dengan waktu dan disertai oleh tersebarnya agama Islam ke seluruh penjuru dunia, telah terjadi kontak sosial dan budaya dan akan mempengaruhi kepada ajaran agama Islam itu sendiri. Budaya masyarakat dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan, sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan sebuah ajaran, paham yang berasal dan diciptakan oleh sekelompok masyarakat atau

¹ Nurcholis Madjid, kata pengantar dalam Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Study Tentang Percaturan dalam Konstituante*. (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. IX

² Nurcholish Madjid, *Islam dan Politik Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan*, dalam *jurnal politik islam paramadina* (elite- ebook/media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Politik N. html (1 of 8) 13/05/2006 15:13:43)

³ Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Negara dan Agama Merajut Hubungan Antar Umat*. (Jakarta : Buku Kompas. 2002.) hlm 34-35

⁴ Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, (cet. ke-1. Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 2

perorangan akan hidup dan tumbuh pada waktu yang bersamaan selagi tokoh atau orang yang menciptakan ajaran itu masih hidup, dan hanya sesuai pada waktu zaman itu juga. Dalam pandangan Buya Syafii Maarif, ketika Islam diaplikasikan dalam konteks keindonesiaan maka akan memunculkan sebuah Islam yang ramah, terbuka, inklusif dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa Indonesia.⁵

Menurut Ahmad Syafii Maarif, secara doktrinal Islam tidak menetapkan dan menegaskan pola apapun tentang teori negara Islam yang wajib digunakan oleh kaum Muslim. H.A.R. Gibb seperti dikutip Buya Ahmad Syafii Maarif, memaparkan bahwa baik Al-Qur'an maupun Sunnah tidak memberikan petunjuk yang tegas tentang bentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya sebagai cara bagi umat untuk mempertahankan persatuannya.⁶ Argumentasi Buya Syafii Maarif ini berangkat dari asumsi bahwa Islam bukanlah sekedar cita-cita moral dan nasihat-nasihat agama yang lepas begitu saja. Islam membutuhkan sarana sejarah untuk mewujudkan cita-cita moralnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sarana yang dimaksud Buya Ahmad Syafii Maarif tidak lain adalah negara, sehingga Syafii Maarif menolak pandangan yang menghendaki pemisahan Islam dan negara.

Ahmad Syafii Maarif, sebagai salah satu intelektual Muslim terkemuka dan berpengaruh di Indonesia, pandangan-pandangannya tentang relasi agama (Islam) dan negara, serta agama dan kekuasaan menemukan momentumnya di saat bangsa ini banyak dibelit berbagai problematika, terutama terkait masalah ideologi negara. Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk mengetengahkan dan mengkaji pemikiran Ahmad Syafii Maarif yang moderat, inklusif, dan substansialistik.

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana relasi agama dan negara dalam pemikiran

Ahmad Syafi'i Ma'arif, serta apa yang melatarbelakangi munculnya pemikiran politik negara dan agama Ahmad Syafi'i Ma'arif tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa pandangan politik Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam menjelaskan relasi antara agama dan kekuasaan. Selain itu mengkaji tentang kekuatan dan kelemahan pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam merumuskan hubungan negara dan agama serta agama dan kekuasaan. Manfaat Penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual muslim dalam perdebatan negara dan agama serta agama dan kekuasaan. Menemukan konsep yang sistematis dalam menginterpretasikan agama dan negara serta agama dan kekuasaan sehingga tercipta pola hubungan yang seimbang dan harmonis. Memberikan nuansa berfikir yang lebih kondusif dan realistis.

B. Kajian Teoritik

Teori politik Islam (*fiqh siyasah*). Menurut Abul A'la Al Maududi, secara garis besar teori Politik Islam meliputi, pertama: azas pertama dalam teori politik Islam adalah kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh para Rasul (Allah). Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam. Ajaran pokok islam menyatakan bahwa manusia, secara individual maupun kolektif, harus memberikan semua haknya untuk memimpin, menetapkan aturan dan melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan kepada sesamanya.⁷ Berdasarkan teori ini kedaulatan adalah milik Allah, Dia sendirilah yang menetapkan hukum. Tidak seorangpun, bahkan nabi pun, tidak berhak memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu atas dasar hak (atau kemauan) nya sendiri.⁸

Kedua: Negara Islam, hakikat dan ciri-

⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Sejarah* (Cet.I, Bandung : PT Mizan Pustaka), hlm. 15

⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah...*, loc.cit.hal. 20.

⁷ Abul A'la Maududi, *Teori Politik Islam dalam Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah* oleh John J. Donohue dan John L. Esposito, Cet. III. (Jakarta : citra niaga Rajawali Pers, 1993) hlm. 465

⁸ Ibid. hlm 466

cirinya. Islam sangat menentang filsafat kedaulatan rakyat dan berpandangan politik atas dasar kedaulatan Allah dan kekhilafahan manusia. Nama yang lebih tepat untuk diberikan kepada pandangan politik kenegaraan Islam adalah konsep "kerajaan Allah" yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "theo-cracy". Teokrasi yang dibangun berdasarkan Islam, ia tidak ditempatkan dibawah kekuasaan kelas agama tertentu melainkan ditangan seluruh masyarakat muslim. Kaum muslimin secara keseluruhan menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk kitab suci (Al-Qur'an) dan aturan-

aturan pelaksanaan yang dijalankan oleh Rasul-Nya.⁹

Ketiga: tujuan negara Islam dapat dirumuskan atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Allah. Al-Qur'an menyatakan :

"Sesungguhnya Kami telah mengatur Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah Kami turunkan bersama mereka kitab suci dan neraca agar manusia dapat menciptakan keadilan. Dan Kami telah menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat, dan manfaat yang banyak bagi manusia....."¹⁰

Dalam ayat ini besi melambangkan kekuatan politik, dan ayat ini juga menjelaskan bahwa tugas para nabi adalah menciptakan suasana kehidupan, dimana rakyat memperoleh jaminan atas keadilan sosial yang sejalan dengan tolak ukur ilahi yang dijelaskan Allah dalam kitab sucinya, yang antara lain berisi aturan-aturan untuk membentuk suatu kehidupan yang berdisiplin baik.¹¹ Tujuan negara Islam adalah melenyapkan segala bentuk kejahatan dan mengembangkan kebaikan dan keutamaan sebagaimana dengan jelas telah dikemukakan oleh Allah didalam Kitab Al-Qur'an itu. Untuk mencapai tujuan inilah kekuasaan politik itu dipergunakan dan, dimana perlu, segala macam alat propaganda

dan himbauan tanpa kekerasan dimanfaatkan juga. Demikian juga pendidikan moral dikalangan rakyat ditingkatkan, pengaruh sosial dan kekuatan pendapat khalayak (public opinion) juga diarahkan kepada tercapainya tujuan tersebut.¹²

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana latar belakang dan lahirnya pemikiran Buya Syafii dalam hal negara dan agama. Sebagaimana di kemukakan oleh Karl Mannheim, perubahan dinamika pemikiran dalam sosiologi pengetahuan sangat berkaitan dengan eksistensi gagasan dalam suatu struktur sejarah. Sosiologi pengetahuan menitikberatkan sebuah analisa pada eksistensi gagasan kepada studi historis kongkret yang dimaknai, sejarah merupakan konteks dari lahirnya sebuah pemikiran.

*"Rather, the sociology of knowledge seeks to comprehend thought in the concrete setting of an historical situation out of which individually differentiated thought only very gradually emerges."*¹³

Asumsi dasar dari sosiologi pengetahuan adalah sebuah gagasan tidak hanya lahir dari dialektika internal atau psikologis, tetapi juga subjek tidak lepas dari selimut sejarah apa yang mewarnai periode tertentu.

Pemikiran dapat lahir melalui perdebatan dan dominasi pemikiran tertentu dalam sebuah konteks historis, pemikiran yang mendominasi tersebut diberikan respon dan dikembalikan dipahami sebagai pandangan hidup. Bagi Mannheim, intelektual adalah kelompok yang sangat penting dalam suatu masyarakat, Intelektual adalah orang yang merespon keadaan zaman dan sejarah hingga melahirkan pandangan hidup bagi masyarakatnya. Pada hakikatnya, sosiologi pengetahuan merupakan sebuah usaha mengetahui bagaimana lahirnya sebuah pemikiran yang dilahirkan melalui konteks dan dinamika historis yang terkait dengan konteks sosial masyarakat.

⁹ Ibid. hlm 468-469

¹⁰ Q.S. 57:25

¹¹ Abul A'la Maududi, *Teori Politik Islam*..... Loc cit. 472

¹² Ibid.

¹³ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia*, (USA : Harvest Book, 1936) hlm. 3

C. Pembahasan

1. Gagasan Tentang Relasi Negara dan Agama Ahmad Syafii Maarif

Pandangan Buya Syafii tentang pola hubungan antara negara dan agama secara garis besar bukan sekedar pola hubungan dikotomis yang saling meniadakan. Pola hubungan Islam dan negara adalah dimana Islam bukan semata-mata sebagai ritual peribadatan hamba kepada tuhan saja, tetapi lebih dari itu Islam menyangkut hal-hal tentang bagaimana kaedah-kaedah, batas-batas dalam muamalah dan bersosial dalam masyarakat. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka Buya Syafii menginginkan supaya aturan-aturan dan patokan-patokan tersebut dapat terjaga dan direalisasikan maka harus ada negara atau kekuasaan politik yang melindunginya. Buya Syafii dengan cermat memahami antara Al-Qur'an dan karier Muhammad selama kerasulannya mengatakan bahwa wawasan kekuasaan dalam Islam harus disinari oleh wawasan moral sebagai salah satu indikator iman dalam konteks dan realitas sosial. Realitas sejarah telah menunjukkan kepada kita bagaimana Islam dalam berbagai periode dan diberbagai negara seringkali mengkhianati cita-cita politik Islam itu sendiri, hanya karena alasan yang dicari-cari, tetapi cita-cita politik Islam tersebut tidak akan lenyap dari pemikiran para pemikir-pemikir Muslim.

Menurut pemahaman Buya Syafii Islam bukanlah hanya cita-cita moral dan nasehat-nasehat agama yang dapat lepas begitu saja, tetapi Islam memerlukan sarana untuk mewujudkan cita-cita moralnya yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Di mata Al-Qur'an tidak sedikitpun dari dimensi kehidupan manusia yang terlepas dari sorotan wahyu, dengan demikian jika ada pemikir muslim yang berpendapat bahwa Islam dan negara harus dipisahkan maka pendapat tersebut tidak memiliki landasan teoritis yang kuat, bahkan dalam jangka yang lebih panjang akan mengakibatkan pada kerja bunuh diri. Dalam pandangan Buya Syafii, tidak ada pemisahan antara negara dan agama adalah berdasarkan Al-Qur'an, dalam Q.S Al- An'am: 162 menegaskan "Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup matiku, adalah untuk Allah, pemelihara alam semesta. Dari ayat ini shalat di masjid, jualan di pasar, pidato

dalam parlemen tidak dapat ditempatkan dalam kategori dikotomis antara ibadah dan kerja sekuler, shalat dimasjid adalah ibadah, sedangkan pidato dalam parlemen merupakan juga kerja sekuler yang harus berada dibawah wawasan moral dan etika Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat banyak membicarakan tentang sebuah mesin kekuasaan, yang dimaksud dengan mesin kekuasaan disini adalah sebuah Negara yang berfungsi sebagai alat pemaksa terhadap anggota masyarakat agar mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Tetapi Buya Syafii juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah negara dan agama, dalam pandangannya negara adalah sesuatu yang *mutable* (berubah) sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu, sedangkan agama merupakan sesuatu yang *immutable* (tetap) tidak lekang oleh ruang dan waktu.

Buya Syafii menolak adanya gagasan tentang negara Islam, menurutnya gagasan tentang negara Islam tidak memiliki basis religio-intelektual yang kukuh. Piagam Madinah yang merupakan hasil karya Rasulullah tidak menyingung sama sekali masalah negara Islam, sehingga Buya Syafii menganggap bahwa fenomena Negara Islam merupakan fenomena abad 20. Tetapi juga tidak dapat diabaikan bahwa Islam membutuhkan sebuah mesin pemaksa dalam bentuk negara dengan kekuasaan politik untuk membumikan cita-cita dan ajaran moral yang terdapat dalam Al-Qur'an. Posisi nabi Muhammad dalam Al-Qur'an hanyalah sebagai seorang rasul, tetapi juga tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan sejarah Nabi Muhammad pernah menjabat sebagai pemimpin negara sekaligus sebagai pemimpin agama. Posisi sebagai Rasulullah tidak pernah berubah hingga beliau wafat pada 632 M, kedudukan nabi muhammad sebagai rasul ini termaktub dalam Ali-Imron: 144 "Muhammad hanyalah seorang Rasul". Ayat inilah yang kemudian digunakan oleh Buya Syafii untuk menolak statement bahwa Islam adalah agama dan negara, bagi Buya Syafii statement ini akan mengaburkan hakikat yang sebenarnya dari posisi kenabian Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa dan juga tidak pernah mendeklarasikan sistem dan bentuk pemerintahan yang baku, yang harus

diikuti oleh umat Islam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin yang visioner, beliau paham betul bahwa masyarakat muslim adalah masyarakat yang dinamis dan pluralis, apabila hanya ada satu bentuk pemerintahan yang harus di amini oleh seluruh umat Islam maka secara politis akan menyulitkan negara tersebut. Sehingga sekalipun Buya Syafii menyerukan akan pentingnya negara dalam Islam, tetapi dia menolak pandangan yang mengatakan bahwa Islam adalah *daulah* (negara) dan *din* (agama). Pandangan Buya Syafii tentang relasi negara dan agama bertentangan dengan pendapat dari para pengusung negara Islam dengan melakukan formalisasi syariat Islam menjadi hukum negara, bagi kelompok ini Islam merupakan agama sekaligus negara merupakan perintah dari Tuhan yang wajib dilakukan dan dilaksanakan sebagai amal shaleh.

Mekanisme politik yang beragam dapat kita lihat dari sejarah kepemimpinan *Khulafa ar-Rasyidin*, pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW umat Islam mengalami yang namanya krisis kepemimpinan, dalam penjelasan Fazlur Rahman sebagaimana di kutip Buya Syafii mengalami krisis konstitusional¹⁴. Umat Islam mengalami kebingungan karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan pesan apapun tentang siapa yang akan menggantikan beliau, sehingga atas konsensus para petinggi Islam di Banu Sa'idah, maka ditunjuklah Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad. Pertemuan yang terjadi di Banu Sa'idah dalam pandangan Buya Syafii menjadi titik tolak yang amat penting bagi perjalanan politik Islam, pertemuan tersebut dapat dikatakan sebagai pelaksanaan syura pertama oleh umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Pengangkatan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah menuai perselisihan antara umat Islam, antara kubu yang mendukung Ali Bin Abi Thalib dan yang tetap mendukung Abu Bakar sebagai Khalifah. Ali dan kelompoknya

mengklaim bahwa yang berhak menggantikan Rasulullah adalah keluarga terdekat

Nabi sendiri, tetapi karena berbagai alasan politik maka Ali disingkirkan dari percaturan politik dan Abu Bakar tetap terpilih secara aklamasi menjadi Khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad. Sepeninggal

Abu Bakar kepemimpinan dipegang oleh Umar Bin Khattab melalui wasiat yang diberikan Abu Bakar, pasca Umar Bin Khattab lengser, jabatan khalifah diberikan kepada Utsman Bin Affan melalui tim formatur yang diprakarsai Umar. Sepeninggal wafatnya Utsman, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ali Bin Abi Thalib melalui aklamasi, ketidakbakuan

sistem kepemimpinan pada masa khalifah menandakan bahwa sistem khalifah muncul untuk merespons kondisi sosio-kultural pada waktu itu. Pasca periode Khulafa ar-rasyidin, terjadi transformasi yang sangat mendasar dalam sistem politik pada periode Bani Umayyah dan Bani Abasiyyah, berbeda dengan periode sahabat, sistem khalifah pada periode ini dijalankan secara dinasti atau kekeluargaan dan berlangsung hingga Bani Usmaniyyah. Sistem khilafah Islamiyah sempat eksis dan berkuasa selama kurang lebih 13 abad lamanya, terhitung sejak masa *khulafa ar- rasyidin* pada 632 M hingga masa Turki Utsmani yang berakhir pada tahun 1924 M. Rentang waktu selama itu, tak dapat dipungkiri sistem khilafah pernah menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang dominan. Kalangan yang menginginkan formalisasi syariat Islam sering mengklaim bahwa model pemerintahan tersebut sebagai model yang harus diadopsi oleh umat Islam, kesuksesan pada masa khilafah inilah yang melatar belakangi sebagian umat Islam untuk mendirikan negara Islam.

Rekam sejarah perjalanan Islam Indonesia, ada sebagian kalangan yang menginginkan Islam sebagai dasar negara Indonesia dengan alasan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Tokoh Islam Indonesia yang dengan sangat getol menginginkan Indonesia sebagai negara Islam adalah Muhammad Natsir dengan pemikiran persatuan negara dan agama. Dalam pidatonya didepan Majelis Konstituante, Natsir menginginkan Islam sebagai dasar negara karena penduduk Indonesia mayoritas adalah Muslim, Natsir berdalil bahwa untuk dasar negara Indonesia hanya mempunyai dua pilihan yakni paham sekularisme (*la diniyyah*) dan paham agama (*dini*)¹⁵. Bagi Natsir, negara sebagai kekuatan dunia merupakan sesuatu yang mutlak dalam Al-Qur'an dan hanya dengan kekuasaan politik (negara) aturan- aturan dan

ajaran-ajaran Islam dapat terimplementasikan dalam kehidupan nyata, maka dari itu Natsir membela prinsip persatuan negara dan agama. Menurut Buya Syafii, aspirasi dari para tokoh Islam Indonesia di masa kemerdekaan untuk mendirikan negara Islam apabila dikaji secara mendalam tidak memiliki tujuan yang jelas aspirasi Islam yang diperjuangkannya. Bagi Buya Syafii bukan sesuatu yang mudah untuk menempatkan Syariat Islam ke dalam mekanisme kehidupan politik modern, Ia mencontohkan negara Pakistan sebagai negara Islam yang hingga sampai saat ini masih bingung untuk menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan kenegaraannya. Dalam konteks ini, Buya Syafii mengkritik para tokoh Islam masa lampau yang menurutnya lebih mengutamakan wadah, yaitu menegakkan negara berdasarkan Islam secara formal.

Menurut Buya Syafii Islam tidak mempermasalahkan apapun nama dan bentuk pemerintahan yang dipakai oleh pemimpin Islam, yang terpenting adalah bagaimana moral-etik dapat berjalan dengan baik dalam sebuah negara tersebut. Dalam hal ini Buya Syafii memandang Al-Qur'an petunjuk etik bagi manusia dan bukanlah sebuah kitab ilmu politik, institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia senantiasa berubah dari zaman ke zaman. Diamnya Al-Qur'an dalam masalah sistem pemerintahan mana yang harus digunakan oleh umat Islam, merupakan suatu jaminan yang sangat luas bagi manusia untuk menggunakan akalnya dalam memilih sistem pemerintahan yang tepat untuk umat Islam itu sendiri. Tujuan terpenting Al-Qur'an dan juga Islam adalah supaya nilai-nilai dan perintah-perintah etiknya dijunjung tinggi serta bersifat mengikat terhadap kegiatan-kegiatan sosio-politik umat Islam. Nilai-nilai tersebut secara menyeluruh dan integral dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kemerdekaan yang kesemuanya itu menempati posisi sentral dalam ajaran moral Al-Qur'an.

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia menurut Buya Syafii memberikan suatu pondasi yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip etika dan moral bagi kehidupan ini. Al-Qur'an memposisikan kehidupan manusia sebagai sebuah keseluruhan yang terintegrasi dan harus

mendapatkan bimbingan berupa etika dan moral yang terdapat dalam ayat-ayatnya. Agar dapat merealisasikan ajaran Islam maka dibutuhkan negara sebagai penyokong agama, bagi Buya Syafii negara merupakan alat yang sangat penting bagi agama, tetapi Buya Syafii menolak untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Aspirasi politik umat Islam hendaknya tidak menginginkan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara dan memformalisasi syariat Islam, akan tetapi umat Islam harus menjalankan kehidupan atas dasar kebersamaan dan musyawarah (*syura*). Prinsip *syura* sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menghendaki terciptanya masyarakat yang egaliter dengan menjalankan mekanisme *syura*, dalam pandangan Buya Syafii prinsip dasar yang paling pokok adalah konsep *syura* yang menjadi cita-cita sentral dalam cita-cita politik Al-Qur'an. Buya Syafii mengatakan bahwa *syura* sangat dekat dengan sistem demokrasi, sehingga dapat dikatakan bahwa *syura* merupakan demokrasi khas Islam.

Buya Syafii menyadari bahwa di era modern ini tidaklah mudah untuk menemukan sebuah model negara yang menerapkan prinsip egaliter dan *syura* diantara negar-negara yang menyebut dirinya sebagai negara berdasarkan Islam. Menurut Buya Syafii negara-negara Islam pada saat ini telah menyimpang dari ajaran Al-Qur'an, selain Pakistan Buya Syafii mencontohkan Iran sebagai negara Islam, negara republik Islam Iran pada awalnya diperkirakan dapat menjadi model negara Islam, tetapi pada kenyataannya tidak berhasil. Pola kehidupan di Iran yang sangat elitis dan kekuasaan di Iran tersentral pada para penguasa politik dengan mengabaikan prinsip *syura* (demokrasi) membuat banyak pihak kecewa. Buya Syafii juga menyayangkan sikap dari para ahli hukum Islam dan beberapa negara muslim yang masih sistem politik monarkhi adalah sistem politik Islam, maka dari itu wajib dipertahankan.

Pandangan politik Buya Syafii lebih menekankan pada nilai-nilai substantif Islam seperti kesejahteraan, persamaan, keadilan, kebebasan dan seterusnya daripada melakukan formalisasi hukum Islam sebagai dasar negara. Bagi Buya Syafii negara

dengan segala atribut yang disandangnya bukan masalah yang fundamental dalam Islam,

dengan kata lain apapun bentuk negaranya bukan menjadi hal yang penting, yang terpenting adalah pemerintah negara tersebut mampu mewujudkan kemashlahatan, keadilan, kebebasan dan nilai-nilai substansial lainnya bagi masyarakat. Kekuasaan Islam harus dibangun atas dasar landasan etik-moral, menurut Buya Syafii kekuasaan semestinya menjadi kendaraan moral atau alat moral yang efektif bagi tegaknya moral, tetapi sekarang yang terjadi adalah banyak negara agama atau moral yang dijadikan kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Dalam landasan prinsip moral inilah Buya Syafii berpedoman bahwa prinsip-prinsip Islam akan menjadi tegak, selain itu buya Syafii sangat mengecam para elit yang sering membawa nama Islam, tetapi perilakunya sangat jauh dari perilaku yang mencerminkan sebagai seorang muslim.

2. Latar Belakang Pemikiran Politik Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif menjalani kehidupannya sebagai seorang anak desa yang hidup dalam serba kekurangan. Cita-cita yang muncul di kepala hanya bagaimana caranya untuk dapat melakukan mobilitas vertikal dengan berbagai macam cara, Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan modern Islam begitu diterima di Sumatera Barat yang pada dasarnya memiliki haluan Islam yang sama. Kultur Minangkabau di desain untuk berubah, sangat lentur dan mau mengakui segala yang asing dari dirinya karena memang bukan autentisitas kebudayaan lokal sebagai basis nilainya tetapi transformasi. Buya Syafii melakukan sebuah mobilisasi geografis ke Yogyakarta, langkah ini merupakan sebuah kewajaran bagi orang Minangkabau karena melihat bergerak ke luar strukturnya adalah sebuah mobilisasi vertikal. Muhammadiyah yang terlibat sebagai anggota istimewa dari partai Masyumi menjadi sebuah model yang dominan dalam pemikiran Buya Syafii, Muhammadiyah yang begitu aktual dalam hidup Buya Syafii akan selalu di ikuti kemanapun afiliasinya.

Posisi Islam secara ekonomi dan politis begitu tidak berdaya pada masa Orde Baru, akan tetapi Islam dapat tempat dalam birokrasi kenegaraan begitu juga posisi Ahmad Syafii Maarif adalah sebagai pegawai Negeri yang

diangkat pada masa Orde Baru. Posisinya sebagai pengajar jurusan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak lepas dari kontribusi Muhammadiyah yang memberikan pendidikan dengan basis modern hingga watak developmentalis Orde Baru begitu dekat dengan ide-ide Muhammadiyah. Ahmad Syafii Maarif berangkat ke Ohio University di Athens, dimana pada fase ini Buya Syafii semakin meyakini cita-cita mendirikan negara Islam dan penolakan mentah terhadap sekularisme yang sudah ia kagumi sejak usia muda. Nama-nama seperti Muhammad Iqbal, Khaled Abou el Fadl, Maududi, Taymiah, Afghani, Qutb menjadi ruh penasaran yang selalu membayangi pemikirannya.

Ahmad Syafii Maarif pindah ke Universitas Chicago dengan obsesi dan kekecewaan yang mendalam akibat dibubarkannya Masyumi. Pertemuannya dengan Fazlur Rahman mengubah berbagai pandangan Buya Syafii Maarif. Dengan kemampuan Rahman, Buya Syafii ketepatan Rahman dalam kembali kepada Al-Qur'an dan mengkonstruksinya menjadi sebuah pedoman etis dan moral dengan pikiran yang adil, tanpa ada rasa dendam politis. Fazlur Rahman masih meyakini bahwa Negara Islam adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak begitu dengan Buya Syafii, sebuah mobilitas vertikal dalam pemikiran yang sangat radikal dan diikuti oleh mobilitas vertikal dalam kehidupan Ahmad Syafii Maarif. Buya Syafii dapat hidup dari bekerja dengan orang yang tidak pernah mengenal Al-Qur'an, namun begitu hidupnya begitu sangat toleran tidak seperti yang terjadi di Pakistan yang mendasarkan konstitusinya pada Islam selalu di hiasi oleh perang suku dan bom bunuh diri.

Ahmad Syafii Maarif kembalinya dari Chicago dan menetap di Indonesia bergabung kembali dengan Muhammadiyah, ini merupakan fase awal dari perjalanan intelektual Buya Syafii pasca Chicago. Buya Syafii masuk dalam dunia pertentangan dakwah Muhammadiyah antara golongan teologi puritan dan golongan intelektual hasil didikan Barat. Intelektual yang berlatar belakang barat dibawa oleh Amien Rais sedangkan para ulama puritan yang sudah lama eksis dalam Muhammadiyah dan

memiliki *image* sebagai kelompok Muslim yang puritan. Buya Syafii mendapatkan kesulitan dalam mendamaikan pertentangan yang ada dalam tubuh Muhammadiyah tersebut, karena cita-cita Islam yang ia usung sangat universal. Hal ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dapat diterima dalam tubuh Muhammadiyah yang berada dalam *image* eksklusifnya yang telah bertahun-tahun menghinggapi pergerakan Muhammadiyah. Ahmad Syafii Maarif benar-benar dapat membumikan pemikirannya pada saat setelah ia selesai menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, dengan mendirikan Maarif Institute maka Buya Syafii melakukan hubungan lintas agama yang menjadi fokus utama dalam membangun masyarakat yang demokratis dan egaliter.

Ahmad Syafii Maarif melakukan penafsiran yang universal dari ajaran-ajaran Al-Qur'an hingga semangat moralnya dapat diterima oleh berbagai kelompok dan juga agama. Visi pluralism baginya adalah sebuah keadaan dimana setiap orang dapat hidup bersama tanpa ketakutan, oleh karena itu Buya Syafii ingin menafsirkan ajaran Islam sebagai kelompok yang mayoritas menjadi sesuatu yang universal agar dapat diterima dalam kelompok sekecil apapun. Dalam pandangan Buya Syafii negara Islam adalah sebuah konsep yang akan menghasilkan ketakutan bagi kelompok minoritas karena semangatnya sangat partikular, sehingga menimbulkan ketakutan bagi yang minoritas terhadap ide tersebut. Buya Syafii mengkonstruksi Islam sebagai ajaran yang universal, tokoh agama lain pun juga memposisikan agama seperti itu, dimana mereka juga mengkonstruksi ajarannya sebagai sebuah universal. Mereka menganggap dengan cara menjunjung tinggi penguniversalan lewat ide kemanusiaan

dan demokrasi akan mempertegas nilai keagamaan mereka. Agama sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan persoalan, tidak seperti yang dituduhkan oleh kelompok sekuler yang memposisikan agama sebagai sumber konflik, agama bisa mengatakan bahwa merekalah yang aktual dalam kekacauan yang diciptakan sekulerisme. Ahmad Syafii Maarif menentang adanya ketidakadilan negara adalah sebuah perjalanan untuk semakin menghayati Islam, bukan hanya sebagai seorang yang

menjunjung keadilan dan demokrasi. Selain itu yang menjadi kelebihan dari Buya Syafii adalah ia menjadi seorang agen yang pemikirannya dapat diterima sebagai produk pemikiran Islam. Melalui mobilisasi dalam hal pendidikan, Buya Syafii memiliki pandangan yang dibangun oleh kultur akademisi yang penuh dengan pertanyaan terhadap suatu keyakinan dan memproduksi gagasan-gagasan yang lebih produktif dan bervariasi terhadap persoalan yang begitu dekat dengan masyarakat.

D. Kesimpulan

Ahmad Syafii Maarif adalah seorang Intelektual Muslim yang menggunakan semangat moral Islam, dalam hal ini kalimat tersebut merupakan sebuah kesimpulan umum mengenai semua pemikiran Islam dari Ahmad Syafii Maarif. Dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif Islam dapat dijadikan petunjuk moral bagi semua masyarakat Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penjelasan ini merupakan sebuah hasil dari pengumpulan Ahmad Syafii Maarif dengan sejarah, yang menjadi *study*-nya dan telah membuatnya dapat melakukan mobilitas yang sangat radikal dalam pemikiran Islam. Penempatan diri dari Buya Syafii dapat terus berubah-ubah sebagai sebuah hasil dari perkembangan pengetahuan hasil berdialog dengan sejarah, hal ini dapat kita lihat dari berubahnya seorang Ahmad Syafii Maarif dari seorang yang fundamentalis menjadi seorang Islam yang terbuka, atau dalam bahasa Buya Syafii sebagai Muslim yang inklusif dan pluralis. Selain itu dapat juga kita lihat bagaimana cita-cita yang awalnya menginginkan untuk terselenggaranya negara Islam nan megah menjadi seorang pembela demokrasi dan Pancasila sebagai sebuah ajaran moral bagi manusia Indonesia. Dalam bahasa singkatnya Ahmad Syafii Maarif dalam hal pemikiran negara dan agama mengalami transformasi pemikiran yang sangat kontras, dari syariat *oriented* pemikiran Moh. Natsir menjadi seorang sosial-demokrat yang menjadi orientasi dari Muhammad Hatta.

E. Daftar Pustaka

- Al Banna, Gamal. 2006. *Relasi Negara dan Agama*. Jakarta : Mata Air Publishing.
- An-Naim, Abdullahi Ahmad. 2007. *Islam dan Negara Sekuler; Karakter Negara Modern*. Bandung: Mizan
- Black, Antony. 2006. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Departemen Agama.
- Donohue, John J dan John L. Esposito. 1993. *Islam dan Pembaharuan : Ensiklopedi masalah-masalah*. Jakarta: citra niaga Rajawali Pres. Cet.III.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2006. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1994. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1995. *Membumikan Islam*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2009. *Titik-titik Kisar di Perjalananku Autobiografi Ahmad Syafii Maarif*. Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Manheim, Karl. 1936. *Ideology and Utopia*. USA : Harvest Book.
- Mardjono, Hartono. 1995. *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Ke Indonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Mars, David dan Gerry Stoker. 2010. *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Bandung : Nusa Media
- Maududi, Abul A'la. 1993. *Teori Politik Islam, dalam buku Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah* oleh John J. Donohue dan John L. Esposito, Cet. III. Jakarta : citra niaga Rajawali Pers.